



**BPS KABUPATEN LINGGA**

## **LAPORAN KEUANGAN**

**TAHUN ANGGARAN 2017**



**Jl. Istana Kota Baru (Kompleks Perkantoran Pemda), Kelurahan Daik,  
Kecamatan Lingga – Provinsi Kepulauan Riau**

**Homepage: <http://linggakab.bps.go.id>, E-mail: [2104@bps.go.id](mailto:2104@bps.go.id)**



**BPS KABUPATEN LINGGA**

## **LAPORAN KEUANGAN**

**TAHUN ANGGARAN 2017**



**Jl. Istana Kota Baru (Kompleks Perkantoran Pemda), Kelurahan Daik,  
Kecamatan Lingga – Provinsi Kepulauan Riau**  
Homepage: <http://linggakab.bps.go.id>, E-mail: [2104@bps.go.id](mailto:2104@bps.go.id)

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2015 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lingga adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lingga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Lingga. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Daik Lingga, 25 Januari 2018  
BPS Kabupaten Lingga

Kepala,



**EKO APRIANTO**  
NIP 19790414 200012 1 003

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	v
Daftar Singkatan	vi
Indeks	vii
SOR	viii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	24
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	34
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	44
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	50
F. Pengungkapan Penting Lainnya	53
VI. Lampiran dan Daftar	54

	<b>Hal</b>
Tabel 1 : Penggolongan Kualitas Piutang	19
Tabel 2 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	21
Tabel 3 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	22
Tabel 4 : Komposisi Anggaran Awal dan Anggaran Setelah Revisi Tahunan TA 2017	24
Tabel 5 : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahunan TA 2017	24
Tabel 6 : Rincian Realisasi PNBPNP per 31 Desember 2017	25
Tabel 7 : Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2017 dan 2016	26
Tabel 8 : Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Tahunan TA 2017	27
Tabel 9 : Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan TA 2017 dan 2016	28
Tabel 10 : Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan TA 2017 dan 2016	31
Tabel 11 : Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahunan TA 2017 dan 2016	32
Tabel 12 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan TA 2017 dan 2016	33
Tabel 13 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan TA 2017 dan 2016	33
Tabel 14 : Rincian Aset Lancar	34
Tabel 15 : Rincian Persediaan	35
Tabel 16 : Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2017 Dan Per 31 Desember 2016	35
Tabel 17 : Rincian Saldo Tanah Per 31 Desember 2017 Dan Per 31 Desember 2016	36
Tabel 18 : Rincian Saldo Nilai Perolehan Tanah	36
Tabel 19 : Rincian Saldo Nilai Perolehan Peralatan dan Mesin	37
Tabel 20 : Rincian Nilai Perolehan Bangunan Dan Gedung Kantor	38
Tabel 21 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2017	39
Tabel 22 : Rincian Aset Lainnya Per 31 Desember 2017 Dan 31 Desember 2016	40
Tabel 23 : Rincian Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2017 Dan 31 Desember 2016	41
Tabel 24 : Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	41
Tabel 25 : Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2017 dan 2016	42
Tabel 26 : Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2017 dan 2016	44
Tabel 27 : Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2017 dan 2016	45
Tabel 28 : Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2017 dan 2016	46
Tabel 29 : Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	46
Tabel 30 : Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	47
Tabel 31 : Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	48
Tabel 32 : Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2017 dan	48

Tabel 33	: Rincian Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	49
Tabel 34	: Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas Tahun 2017	51

1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2017 27

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BUN	: Bendahara Umum Negara
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
MA	: Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran
SIMAK-BMN	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAIBA	: Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPA	: Surat Kuasa Pengguna Anggaran
UP	: Uang Persediaan
TA	: Tahun Anggaran
TAB	: Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	: Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
TPA	: Tagihan Penjualan Angsuran
UP	: Uang Persediaan
BPS	: Badan Pusat Statistik
KUN	: Kas Umum Negara
PDRB	: Pendapatan Domestik Regional Bruto

<b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b>		Halaman
<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>		
Catatan B.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	24
Catatan B.2	Belanja Operasional	26
Catatan B.3	Belanja Modal	33
 <b>NERACA</b>  		
<b>ASET</b>		
Catatan C.1	Aset Lancar	34
Catatan C.2	Aset Tetap	35
Catatan C.3	Aset Lainnya	41
<b>KEWAJIBAN</b>		
Catatan C.4	Kewajiban Jangka Pendek	43
<b>EKUITAS</b>		
Catatan C.5	Ekuitas	44
 <b>LAPORAN OPERASIONAL</b>  		
Catatan D.1	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	45
Catatan D.2	Beban	45
Catatan D.3	Kegiatan Non Operasional	48
Catatan D.4	Beban Pos Luar Biasa	49
 <b>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b>  		
Catatan E.1	Ekuitas Awal	50
Catatan E.2	Surplus/Defisit LO	50
Catatan E.3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	50
Catatan E.4	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	50
Catatan E.5	Koreksi Lain-Lain	50
Catatan E.6	Transaksi Antar Entitas	50
Catatan E.7	Ekuitas Akhir	51
 <b>PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA</b>  		
Catatan F.1	Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual	52
Catatan F.2	Rekening Pemerintah	52
Catatan F.3	Pengungkapan Lain Lain	52



**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LINGGA**  
Jl. Istana Kota Baru (Kompleks Perkantoran Pemda), Kelurahan Daik, Kecamatan Lingga -  
Provinsi Kepulauan Riau 29872  
e-mail: [bps2104@bps.go.id](mailto:bps2104@bps.go.id)

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lingga yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Daik Lingga, 25 Januari 2018

BPS Kabupaten Lingga,  
Kepala,

  
  
**EKO APRIANTO**

**NIP 19790414 200012 1 003**

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Lingga Tahunan 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahunan 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp71.912.473,00.

Realisasi Belanja Negara pada Tahunan 2017 adalah sebesar Rp2.696.620.424,00 atau mencapai 81,76 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp3.298.160.000,00.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017 .

Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.890.093.465,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp10.286.445,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp2.879.807.020,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp56.566.525,00 dan Rp2.833.526.940,00.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.014.760,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp2.868.588.802,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp2.867.574.042,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp71.469.988,00 dan sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp2.769.104.054,00.

### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp2.319.850.096,00 dikurangi Defisit-LO sebesar minus Rp2.796.104.054,00 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp675.791.607,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp2.633.989.291,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp2.833.526.940,00.

### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun Anggaran 2017 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LINGGA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2017 DAN 2016

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	DESEMBER 2017		% thd Angg	DESEMBER 2016
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	71.912.473	0,00	2.941.808
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	<b>71.912.473</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941.808</b>
<b>BELANJA</b>					
<b>Belanja Operasional</b>	<b>B.2</b>				
Belanja Pegawai	B.2.1	2.029.466.000	1.584.568.526	78,08	1.733.045.113
Belanja Barang	B.2.2	1.268.694.000	1.112.051.898	87,65	1.276.111.063
<b>Jumlah Belanja Operasional</b>		3.298.160.000	2.696.620.424	81,76	3.009.156.176
<b>Belanja Modal</b>	<b>B.3</b>				
Belanja Peralatan dan Mesin	B.3.1	-	-	0,00	91.750.000
Belanja Gedung dan Bangunan	B.3.2	-	-	0,00	411.000.000
<b>Jumlah Belanja Modal</b>		-	-	0,00	502.750.000
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>3.298.160.000</b>	<b>2.696.620.424</b>	<b>81,76</b>	<b>3.511.906.176</b>

## II. NERACA

### BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LINGGA NERACA PER 31 Desember 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2017	2016
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>	<b>C.1</b>		
Persediaan	C.1.1	10.286.445	5.914.045
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>10.286.445</b>	<b>5.914.045</b>
<b>ASET TETAP</b>	<b>C.2</b>		
Tanah	C.2.1	1.315.950.000	257.500.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	1.218.251.459	1.218.251.459
Gedung dan Bangunan	C.2.3	1.289.946.000	1.936.779.000
Aset Tetap Lainnya	C.2.4	85.086.798	72.573.070
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.5	(1.029.427.237)	(1.112.300.304)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>2.879.807.020</b>	<b>2.372.803.225</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>C.3</b>		
Aset Tak Berwujud	C.3.1	93.032.354	93.032.354
Aset Lain-Lain	C.3.2	63.749.770	63.749.770
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(156.782.124)	(145.153.082)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>-</b>	<b>11.629.042</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>2.890.093.465</b>	<b>2.390.346.312</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>C.4</b>		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	56.566.525	70.496.216
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>56.566.525</b>	<b>70.496.216</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>56.566.525</b>	<b>70.496.216</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>C.5</b>		
Ekuitas		2.833.526.940	2.319.850.096
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>2.833.526.940</b>	<b>2.319.850.096</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>2.890.093.465</b>	<b>2.390.346.312</b>

**III. LAPORAN OPERASIONAL**

**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LINGGA  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	<b>D.1</b>	1.014.760	811.808
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.014.760</b>	<b>811.808</b>
<b>BEBAN</b>	<b>D.2</b>		
Beban Pegawai	D.2.1	1.570.637.235	1.748.709.143
Beban Persediaan	D.2.2	52.858.215	141.185.323
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	622.079.425	690.596.763
Beban Pemeliharaan	D.2.4	144.526.873	68.754.900
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	298.070.200	486.138.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.6	180.416.854	227.803.135
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>2.868.588.802</b>	<b>3.363.187.264</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(2.867.574.042)</b>	<b>(3.362.375.456)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>D.3</b>		
<b>SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset Nonlancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>			
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya		71.483.013	2.205.600
Beban dari kegiatan non operasional lainnya		13.025	46.650
<b>Jumlah Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional lainnya</b>		<b>71.469.988</b>	<b>2.158.950</b>
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>71.469.988</b>	<b>2.158.950</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>D.4</b>		
Beban Pos Luar Biasa		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(2.796.104.054)</b>	<b>(3.360.216.506)</b>

#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LINGGA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2017	31 Desember 2016
EKUITAS AWAL	E.1	2.319.850.096	2.039.072.405
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	(2.796.104.054)	(3.360.216.506)
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		675.791.607	(50.810.647)
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3	663.277.879	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4	12.513.728	(49.677.317)
LAIN-LAIN	E.5	-	(1.133.330)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.6	2.633.989.291	3.691.804.844
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		513.676.844	280.777.691
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.7</b>	<b>2.833.526.940</b>	<b>2.319.850.096</b>

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. DASAR HUKUM

*Dasar  
Hukum*

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.06/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik

- Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
  18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
  19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN;
  20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
  21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75/PMK.05/2016 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN;
  22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
  23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
  24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara;
  25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
  26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
  27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
  28. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
  29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
  30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KMK.6/2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang

- Milik Negara;
- Entitas  
dan  
Rencana  
Strategis*
31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
  32. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
  33. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
  34. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;
  35. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga;
  36. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
  37. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor.PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan Pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara; dan
  38. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2017.

## **A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS BPS KABUPATEN LINGGA RENCANA STRATEGIS BPS KABUPATEN LINGGA**

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Kabupaten Lingga (Renstra BPS Kabupaten Lingga) Tahun 2015–2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Kabupaten Lingga untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015.

Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah tahun 2015–2019, BPS Kabupaten Lingga menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan BPS menyediakan data statistik yang berkualitas, serta upaya untuk menjalankan perannya sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam kerangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif. Sebagai cerminan dari

upaya ini, BPS telah menetapkan visi “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”. Untuk dapat mewujudkan visi ini, BPS telah merumuskan 3 pernyataan misi, yakni: (1) menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi, berstandar nasional dan internasional; (2) memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan (3) membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Melalui pernyataan visi dan misi tersebut, BPS Kabupaten Lingga memiliki aspirasi untuk mencapai sejumlah tujuan strategis di tahun 2019, yaitu: (1) peningkatan kualitas data statistik; (2) peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan (3) peningkatan birokrasi yang akuntabel. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2015–2019, yakni bahwa BPS Kabupaten Lingga berupaya terus-menerus untuk meningkatkan: (1) kualitas dari produk yang dihasilkannya (data statistik); (2) kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunaannya; dan (3) kualitas dari proses tata kelola (governance) di dalam organisasinya.

Keseluruhan tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 5 sasaran strategis, yang masing-masing memiliki target indikator untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis diwadhahi dalam sejumlah program, yakni: (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS); (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL); dan (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA).

Dalam mencapai tujuannya BPS Kabupaten Lingga memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

### **Visi BPS KABUPATEN LINGGA**

Dalam mendukung Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025 yaitu “Kepulauan Riau berbudaya, maju, dan sejahtera” dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga Tahun 2011-2031 adalah “terwujudnya Kabupaten Lingga sebagai bunda tanah melayu berbasis pada kepulauan dan agrominawisata yang berkelanjutan dan lestari”. BPS Kabupaten Lingga berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal pembangunan nasional di bidang statistik.

Dengan memperhatikan misi pembangunan daerah dan pencapaian BPS Kabupaten Lingga pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode kedua 2011-2015, BPS Kabupaten Lingga menetapkan visi tahun 2015-2019:

“Pelopor Data Statistik Terpercaya  
untuk Semua”  
 (“The Agent of Trustworthy Statistical Data for All”)

Kata “pelopor” mempunyai makna bahwa BPS Kabupaten Lingga sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. Kata “data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kata “untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (impartial) baik pengguna data nasional maupun internasional.

Dengan visi BPS 2015-2019, eksistensi BPS Provinsi Kepulauan Riau sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Di samping itu, visi BPS Kabupaten Lingga juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik.

#### **Misi BPS KABUPATEN LINGGA**

Misi BPS Kabupaten Lingga dirumuskan dengan memperhatikan misi BPS, misi RPJMD 2011-2015 dan tugas, fungsi, dan kewenangan BPS Kabupaten Lingga. Perumusan misi BPS Kabupaten Lingga juga dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk dapat disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) mencakup semua pesan yang terdapat dalam visi, (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai, (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana termasuk instansi pemerintah yang akan dilayani oleh, dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dari para pemangku kepentingan.

Misi BPS Kabupaten Lingga tahun 2015-2019 yakni:

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional

2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik.
3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan

### **Tujuan**

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan statistik.

Adapun tujuan BPS Kabupaten Lingga dalam rangka mencapai Visi BPS Kabupaten Lingga dan mewujudkan Misi BPS Kabupaten Lingga untuk kurun waktu 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan 1 : Peningkatan kualitas data statistik, terkait dengan:
  - Misi ke-1 : Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional,
  - Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.
2. Tujuan 2 : Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, terkait dengan :
  - Misi ke-2 : Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik,
  - Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.
3. Tujuan 3 : Peningkatan Birokrasi yang akuntabel, terkait dengan:
  - Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Tujuan pertama pembangunan statistik menuntut BPS Kabupaten Lingga untuk meningkatkan kualitas data statistik. Tujuan pertama ini akan didukung dan diupayakan dengan menerapkan program Statcap CERDAS (Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia) kerangka penjaminan kualitas.

Tujuan kedua berupa peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik. Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Tujuan kedua ini

akan diperkuat oleh komponen kedua Statcap CERDAS yaitu Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sistem Informasi Manajemen Statistik.

Tujuan ketiga Peningkatan Birokrasi yang akuntabel, di dalam tujuan tersebut terkait dengan misi membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah harus terus dilakukan. Tujuan keempat ini diperkuat dengan komponen ketiga Statcap CERDAS yaitu pengembangan sumber daya manusia.

### **Sasaran Strategis BPS**

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPS Kabupaten Lingga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program BPS. Program BPS terdiri dari program teknis yang merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan program generik merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung dan atau administrasi BPS (pelayanan internal).

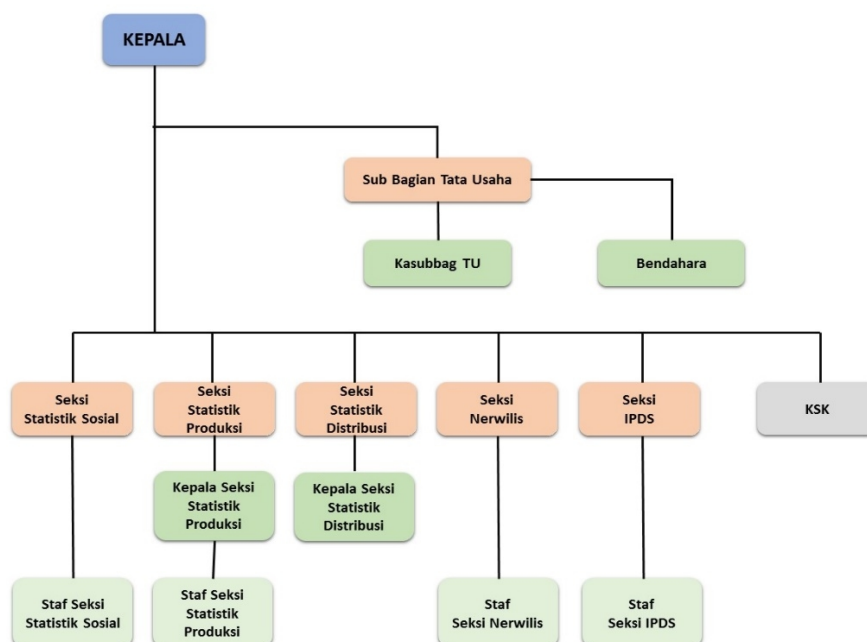
Secara ringkas rumusan indikator pada sasaran strategis pembangunan statistik nasional Indonesia dalam rangka mencapai Visi BPS Kabupaten Lingga dan mewujudkan Misi BPS Kabupaten Lingga untuk kurun waktu 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis dari tujuan pertama: "Peningkatan kualitas data statistik", adalah:
  - 1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data statistik dengan indikator sasaran:
    - 1.1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik
    - 1.1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama
    - 1.1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS
    - 1.1.4. Jumlah release data statistik yang tepat waktu
    - 1.1.5. Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu
    - 1.1.6. Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu
  - 1.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) dengan indikator sasaran:

- 1.2.1. Persentase pemasukan dokumen pendekatan rumah tangga (response rate) survei dengan
  - 1.2.2. Persentase pemasukan dokumen pendekatan usaha (response rate) survei dengan
  - 1.2.3. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha
2. Sasaran strategis dari tujuan kedua: "Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik", adalah:
- 2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) dengan indikator sasaran:
    - 2.1.1. Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS
    - 2.1.2. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website
    - 2.1.3. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS
    - 2.1.4. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS
3. Sasaran strategis dari tujuan ketiga: "Peningkatan birokrasi yang akuntabel", adalah:
- 3.1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS dengan indikator sasaran:
    - 3.1.1. Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu
    - 3.1.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I
  - 3.2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS dengan indikator sasaran:
    - 3.2.1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

### **Struktur Organisasi BPS Kabupaten Lingga**

Berikut ini adalah struktur organisasi BPS Kabupaten Lingga:



Pendek  
atan  
Penyus  
unan  
Laporan  
Keuang  
an

## A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lingga. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis  
Akuntansi

### A.3. Basis Akuntansi

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lingga menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar  
Pengukuran

### A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lingga dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan  
Akuntansi

### A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lingga. Disamping itu, dalam penyusunannya

telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut:

*Pendap  
atan-  
LRA*

#### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

*Pendap  
atan-LO*

#### **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset*

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset*

**a. Aset Lancar**

*Lancar*

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi

apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1  
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset  
Tetap

#### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

Penyusutan  
Aset  
Tetap

#### **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber

sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang  
Jangka  
Panjang

#### d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset  
Lainnya

#### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, piutang jangka panjang dan Cadangan pemerintah. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Aset Tak Berwujud, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Lain-lain serta Kas yang Dibatasi Penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar

harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3  
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### (6). Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Badan Pusat Statistik Kabupaten Lingga* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 4  
Komposisi Anggaran Awal dan Anggaran Setelah Revisi  
Tahunan TA 2017

Uraian	2017	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Perpajakan	0	0
Pendapatan Bukan Pajak	0	0
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	2.029.466.000	2.029.466.000
Belanja Barang	1.294.579.000	1.268.694.000
Belanja Modal	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.324.045.000</b>	<b>3.298.160.000</b>

Realisasi  
Pendapatan  
Rp71.303.617  
.00

### B.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp71.912.473,00. Pendapatan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lingga terdiri dari pendapatan bukan pajak. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 5  
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahunan TA 2017

Uraian	Tahun 2017		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Pendapatan Perpajakan	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	71.912.473	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>71.912.473</b>	<b>-</b>

Pada Tahunan 2017, BPS Kabupaten Lingga memperoleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp71.912.473,00 yang terdiri dari :

1. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp1.014.760,00 yang berasal dari sewa rumah dinas kepala BPS Kabupaten Lingga selama bulan Januari sd Desember 2017
2. Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp1.338.000,00
3. Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp2.779.713,00
4. Penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu sebesar Rp66.780.000,00 .

Rincian realisasi PNBP dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6

Rincian Realisasi PNBP per 31 Desember 2017

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi Pendapatan	%
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp0	Rp 1.014.760	0
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	Rp0	Rp 1.338.000	0
423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Pusat TAYL	Rp0	Rp 2.779.713	0
423953	Penerimaan Kembali Belanja Modal Pusat TAYL	Rp0	Rp 66.780.000	0
<b>Jumlah</b>		<b>Rp0</b>	<b>Rp 71.912.473</b>	<b>0,00%</b>

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak Rp68.970.665,00 atau sebesar 2344,50 persen dibandingkan Tahun 2016.

Tabel 7  
Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2017 dan 2016

Kode	URAIAN	DESEMBER 2017	DESEMBER 2016	NAIK (TURUN) %
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp 1.014.760,00	Rp 811.808,00	25,00
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	Rp 1.338.000,00	Rp 2.130.000,00	-37,18
453952	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	Rp 2.779.713,00	Rp -	-
453953	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	Rp 66.780.000,00	Rp -	-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 71.912.473,00</b>	<b>Rp 2.941.808,00</b>	<b>2344,50</b>

Berdasarkan Tabel 7 Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadi peningkatan pendapatan dari sewa rumah dinas BPS Kabupaten Lingga sebesar Rp202.952,00.
2. Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL mengalami penurunan sebesar 37,18 persen.
3. Penerimaan kembali belanja barang TAYL sebesar Rp2.779.713,00.
4. Adanya penerimaan kembali belanja modal TAYL sebesar 66.780.000,00 yang menjadi pendapatan terbesar pada TA 2017.

Realisasi  
Belanja  
Negara  
Rp2.696.620.4  
24,00

## B.2. Belanja Operasional

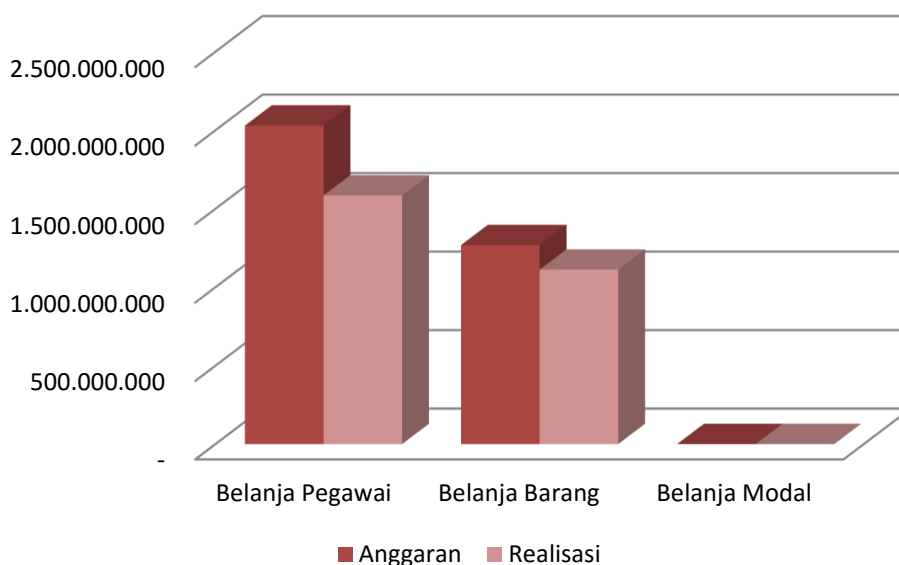
Realisasi Belanja pada BPS Kabupaten Lingga Tahunan TA 2017 adalah sebesar Rp2.696.620.424,00 atau 81,76% dari anggaran belanja sebesar Rp3.298.160.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahunan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 8  
Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2017

Uraian	Semester 1 TA 2017		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	2.029.466.000	1.619.983.826	79,82
Belanja Barang	1.268.694.000	1.112.051.898	87,65
Belanja Modal	-	-	-
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>3.298.160.000</b>	<b>2.732.035.724</b>	<b>82,84</b>
Pengembalian		(35.415.300)	-
<b>Jumlah</b>	<b>3.298.160.000</b>	<b>2.696.620.424</b>	<b>81,76</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 1 : Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2017



Dibandingkan dengan Tahun 2016, Realisasi Belanja 2017 mengalami penurunan sebesar 23,21%. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Tidak adanya anggaran belanja modal untuk tahun anggaran 2017.
2. Realisasi belanja pegawai dan barang pada tahun 2017 juga lebih sedikit bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2016.

Tabel 9  
Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan TA 2017 dan 2016

URAIAN	Realisasi Belanja TA 2017	Realisasi Belanja TA 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1.584.568.526	1.733.045.113	(8,57)
Belanja Barang	1.112.051.898	1.276.111.063	(12,86)
Belanja Modal	-	502.750.000	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>2.696.620.424</b>	<b>3.511.906.176</b>	<b>(23,21)</b>

Sedangkan rincian anggaran dan realisasi belanja per program Tahunan 2017 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Anggaran/ Program Belanja	Anggaran	Realisasi Netto
1	Layanan Perkantoran	2.518.194.000	2.041.218.169
	1.1. Belanja Pegawai	2.029.466.000	1.584.568.526
	1.2. Belanja Barang	488.728.000	456.649.643
	1.3. Belanja Modal	-	-
2	Laporan Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	4.300.000	4.095.000
	1.1. Belanja Pegawai	-	-
	1.2. Belanja Barang	4.300.000	4.095.000
	1.3. Belanja Modal	-	-
3	Laporan Diseminasi Statistik	64.936.000	57.685.625
	1.1. Belanja Pegawai	-	-
	1.2. Belanja Barang	64.936.000	57.685.625
	1.3. Belanja Modal	-	-
4	Laporan Metadata Statistik	2.650.000	1.050.000
	1.1. Belanja Pegawai	-	-
	1.2. Belanja Barang	2.650.000	1.050.000
	1.3. Belanja Modal	-	-
5	Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	86.005.000	84.090.950
	1.1. Belanja Pegawai	-	-
	1.2. Belanja Barang	86.005.000	84.090.950
	1.3. Belanja Modal	-	-

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 (Unaudited)

No	Jenis Anggaran/ Program Belanja	Anggaran	Realisasi Netto
6	Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat	134.846.000	134.101.000
	1.1. Belanja Pegawai	-	-
	1.2. Belanja Barang	134.846.000	134.101.000
	1.3. Belanja Modal	-	-
7	Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial	7.960.000	7.360.000
	1.1. Belanja Pegawai	-	-
	1.2. Belanja Barang	7.960.000	7.360.000
	1.3. Belanja Modal	-	-
8	Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	30.367.000	24.468.500
	1.1. Belanja Pegawai	-	-
	1.2. Belanja Barang	30.367.000	24.468.500
	1.3. Belanja Modal	-	-
9	Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalan, Energi, Dan Konstruksi	14.927.000	12.185.000
	1.1. Belanja Pegawai	-	-
	1.2. Belanja Barang	14.927.000	12.185.000
	1.3. Belanja Modal	-	-
10	Publikasi/Laporan Statistik Distribusi	12.638.000	10.070.250
	1.1. Belanja Pegawai	-	-
	1.2. Belanja Barang	12.638.000	10.070.250
	1.3. Belanja Modal	-	-
11	Publikasi/Laporan Updating Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan	1.000.000	350.000
	1.1. Belanja Pegawai	-	-
	1.2. Belanja Barang	1.000.000	350.000
	1.3. Belanja Modal	-	-
12	Publikasi/Laporan Statistik Sensus Ekonomi	195.767.000	150.925.780
	1.1. Belanja Pegawai	-	-
	1.2. Belanja Barang	195.767.000	150.925.780
	1.3. Belanja Modal	-	-
13	Publikasi/Laporan Statistik Harga	51.190.000	28.443.500
	1.1. Belanja Pegawai	-	-
	1.2. Belanja Barang	51.190.000	28.443.500
	1.3. Belanja Modal	-	-

*Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017 (Unaudited)*

No	Jenis Anggaran/ Program Belanja	Anggaran	Realisasi Netto
14	Publikasi/Laporan Survei Penyempurnaan Diagram Timbang	47.664.000	42.598.000
	1.1. Belanja Pegawai	-	-
	1.2. Belanja Barang	47.664.000	42.598.000
	1.3. Belanja Modal	-	-
15	Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata	15.998.000	12.164.625
	1.1. Belanja Pegawai	-	-
	1.2. Belanja Barang	15.998.000	12.164.625
	1.3. Belanja Modal	-	-
16	Publikasi/Laporan Neraca Produksi	14.757.000	11.016.000
	1.1. Belanja Pegawai	-	-
	1.2. Belanja Barang	14.757.000	11.016.000
	1.3. Belanja Modal	-	-
17	Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran	15.896.000	12.080.625
	1.1. Belanja Pegawai	-	-
	1.2. Belanja Barang	15.896.000	12.080.625
	1.3. Belanja Modal	-	-
18	Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan	56.613.000	51.442.400
	1.1. Belanja Pegawai	-	-
	1.2. Belanja Barang	56.613.000	51.442.400
	1.3. Belanja Modal	-	-
19	Publikasi/Laporan Statistik Hortikultura dan Perkebunan	7.193.000	3.095.000
	1.1. Belanja Pegawai	-	-
	1.2. Belanja Barang	7.193.000	3.095.000
	1.3. Belanja Modal	-	-
20	Publikasi/Laporan Indeks Kemahalan Konstruksi	11.776.000	7.430.000
	1.1. Belanja Pegawai	-	-
	1.2. Belanja Barang	11.776.000	7.430.000
	1.3. Belanja Modal	-	-
21	Publikasi/Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	3.483.000	750.000
	1.1. Belanja Pegawai	-	-
	1.2. Belanja Barang	3.483.000	750.000
	1.3. Belanja Modal	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>3.298.160.000</b>	<b>2.696.620.424</b>

### B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja  
Pegawai  
Rp793.138.78  
7,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahunan TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.584.568.526,00 dan Rp1.733.045.113,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2017 mengalami penurunan sebesar 8,57 persen dari Tahunan Tahun 2016.

Hal ini disebabkan antara lain :

1. Jumlah pegawai yang berkurang karena adanya mutasi pegawai.
2. Adanya pegawai yang pensiun.

Tabel 10

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 31 Des TA 2017	Realisasi 31 Des TA 2016	Naik (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	629.901.600	743.784.820	(15,31)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	8.654	12.526	(30,91)
Belanja Tunjangan Suami/ Istri PNS	40.970.030	43.618.510	(6,07)
Belanja Tunjangan Anak PNS	7.203.422	6.655.240	8,24
Belanja Tunjangan Struktural PNS	33.120.000	32.580.000	1,66
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	22.560.000	14.640.000	0,00
Belanja Tunjangan PPh PNS	4.164.873	5.545.900	(24,90)
Belanja Tunjangan Beras PNS	29.402.520	33.023.520	(10,96)
Belanja Uang Makan PNS	84.030.000	89.990.000	(6,62)
Belanja Tunjangan Umum PNS	16.835.000	23.480.000	(28,30)
Belanja Uang Lembur	41.488.000	0	0,00
Belanja Pegawai (Tunj Khusus/Kegiatan)	710.299.727	794.565.401	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.619.983.826</b>	<b>1.787.895.917</b>	<b>(9,39)</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	(35.415.300)	(54.850.804)	(35,43)
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>1.584.568.526</b>	<b>1.733.045.113</b>	<b>(8,57)</b>

### B.2.2 Belanja Barang

Belanja  
Barang  
Rp1.112.051.  
898,00

Realisasi Belanja Barang TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.112.051.898,00 dan Rp1.276.111.063,00. Realisasi Belanja Barang TA 2017 mengalami penurunan sebesar 12,86 % dari Realisasi Belanja Barang TA 2016.

Tabel 11  
Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahunan TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi TA 2017	Realisasi TA 2016	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	225.022.170	167.412.062	34,41
Belanja Barang Non Operasional	370.722.255	490.108.700	(24,36)
Belanja Jasa	26.333.400	33.047.401	(20,32)
Belanja Pemeliharaan	147.646.873	68.754.900	114,74
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	298.070.200	486.138.000	(38,69)
Belanja Barang Persediaan	44.257.000	30.650.000	44,39
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.112.051.898</b>	<b>1.276.111.063</b>	<b>(12,86)</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>1.112.051.898</b>	<b>1.276.111.063</b>	<b>(12,86)</b>

Tidak ada  
Belanja Modal  
Peralatan dan  
Mesin pada  
periode 31  
Desember  
2017.

### B.3 Belanja Modal

#### B.3.1 Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp91.750.000,00.

Tabel 12  
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
Tahunan TA 2017 dan 2016

URAIAN	Realisasi TA 2017	Realisasi TA 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Me	-	91.750.000	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	-	<b>91.750.000</b>	-

Belanja Modal  
Gedung dan  
Bangunan  
sebesar  
Rp0,00

#### B.3.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp00,0 dan Rp411.000.000,00.

Tabel 13  
Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan  
Tahunan TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi TA 2017	Realisasi TA 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	411.000.000	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	<b>411.000.000</b>	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	-	<b>411.000.000</b>	-

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1 ASET LANCAR

Nilai Aset Lancar untuk periode per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp45.098.755,00 dan Rp5.914.045,00.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada BPS Kabupaten Lingga per 31 Desember 2017 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 14  
Rincian Aset Lancar

No	AsetLancar	Per 31 Desember 2017 (Rp)	Per 31 Desember 2016 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
2	Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
3	Persediaan	10.286.445,00	5.914.045,00
<b>JUMLAH</b>		<b>62.376.900,00</b>	<b>5.914.045,00</b>

Sumber: Neraca Saiba 2017

Persediaan  
Rp10.286.445,00

#### C.1.1 Persediaan

Nilai Persediaan periode per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp8.258.755,00 dan Rp5.914.045,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual. Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 15  
Rincian Persediaan

Persediaan	per 31 Desember 2017	per 31 Desember 2016
(1)	(2)	(3)
Barang Konsumsi	10.286.445	5.914.045
Barang untuk Pemeliharaan		
Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>10.286.445</b>	<b>5.914.045</b>

Sumber: Neraca Saiba 2017

Aset Tetap  
Rp2.879.807.020,00

## C.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap untuk periode per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp2.879.807.020,00 dan 2.372.803.225,00. Rincian Aset Tetap BPS Kabupaten Lingga per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 16  
Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2017 Dan Per 31 Desember 2016

Uraian	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
(1)	(2)	(3)
Tanah	1.315.950.000	257.500.000
Peralatan dan Mesin	1.218.251.459	1.218.251.459
Gedung dan Bangunan	1.289.946.000	1.936.779.000
Aset Tetap Lainnya	85.086.798	72.573.070
Akumulasi Penyusutan	(1.029.427.237)	(1.112.300.304)
<b>Jumlah</b>	<b>2.879.807.020</b>	<b>2.372.803.225</b>

Sumber: Neraca Saiba 2017

Tanah  
Rp 1.315.950.000,00

### C.2.1 Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BPS Kabupaten Lingga periode per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.315.950.000,00 dan Rp257.500.000,00. Dengan demikian, telah terjadi penambahan atas penilaian kembali nilai tanah pada TA 2017. Penambahan nilai aset berupa tanah ini terdiri dari Tanah Bangunan Kantor Pemerintah sebesar Rp1.020.000.000,00 dan Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I (Tanah Rumah Dinas) sebesar Rp38.450.000,00.

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 17  
Rincian Saldo Tanah  
Per 31 Desember 2017 Dan Per 31 Desember 2016

Nama Bangunan	KIB	Luas	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	6.000 m2	1.215.000,000
Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1	500m2	100.950.000
Jumlah			1.315.950.000

Sumber: Neraca Saiba 2017

Tanah yang terletak di Jalan Istana Kota Robot, Daik, Lingga seluas 500 m2 merupakan tanah untuk rumah dinas Kepala BPS Kabupaten Lingga sebanyak 1 unit, dan sudah dibalik nama atas nama Pemerintah Republik Indonesia CQ. Badan Pusat Statistik.

Tanah bangunan Gedung Kantor Pemerintah terletak di Jalan Istana Kota Baru (Komp. Perkantoran Pemda) Daik Lingga seluas 6.000 m2 dan sudah dibalik nama atas nama Pemerintah Republik Indonesia CQ. Badan Pusat Statistik.

Tabel 18  
Rincian Saldo Nilai Perolehan Tanah

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	257.500.000
(1)	(2)
Mutasi tambah:	1.058.450.000
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2017	1.315.950.000

Sumber: Neraca Saiba 2017

Peralatan dan Mesin  
Rp1.218.251.459,00

### C.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin periode per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 memiliki nilai yang sama yaitu sebesar Rp1.218.251.459,00. Sedangkan nilai buku peralatan dan mesin pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya

menjadi sebesar Rp204.412.184,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 19

Rincian Saldo Nilai Perolehan Peralatan Dan Mesin

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016</b>	<b>1.218.251.459</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian dan Transfer Masuk	0
Hibah Barang	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>1.218.251.459</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	1.013.839.275
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2017</b>	<b>204.412.184</b>

Sumber: Neraca Saiba 2017

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

### C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan untuk periode per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp1.289.946.000,00 dan Rp1.936.779.000,00. Sedangkan nilai buku gedung dan bangunan pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya menjadi sebesar Rp1.274.358.038,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 20

Rincian Nilai Perolehan Bangunan Dan Gedung Kantor

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016</b>	<b>1.936.779.000</b>
Mutasi tambah:	
Bangunan Gedung Kantor Permanen	-
Rumah Negara Gol 1 Tipe C Permanen	-
Pagar Permanen	152.641.160
Mutasi kurang:	
Bangunan Gedung Kantor Permanen	(665.735.000)
Rumah Negara Gol 1 Tipe C Permanen	(96.659.000)
Pagar Permanen	(37.080.160)
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>1.289.946.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	15.587.962
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2017</b>	<b>1.274.358.038</b>

Sumber: Neraca BMN 2017

Transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berasal dari pagar permanen senilai Rp152.641.160,00.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya  
Rp85.086.798,00

#### C.2.4 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan. Saldo Aset Tetap Lainnya untuk periode per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 adalah Rp85.086.798,00 dan Rp72.573.070,00. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap  
(Rp1.029.427.237,00)

### C.2.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk periode per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar minus Rp1.029.427.237,00 dan minus Rp1.112.300.304,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 21  
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	1.315.950.000	0	1.315.950.000
2	Peralatan dan Mesin	1.218.251.459	1.013.839.275	204.412.184
3	Gedung dan Bangunan	1.289.946.000	15.587.962	1.274.358.038
4	Aset Tetap Lainnya	85.086.798	0	85.086.798
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>3.909.234.257</b>	<b>1.029.427.237</b>	<b>2.879.807.020</b>

Sumber: Neraca BMN 2017

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya  
Rp0,00

### C.3 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya untuk periode per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 dan Rp11.629.042,00. Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik kedalam aset tetap maupun aset lancar.

Rincian aset lainnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 22  
Rincian Aset Lainnya

Per 31 Desember 2017 Dan 31 Desember 2016

Uraian	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
Aset Tak Berwujud	93.032.354	93.032.354
Aset Lain -lain	63.749.770	63.749.770
<b>Jumlah</b>	<b>156.782.124</b>	<b>156.782.124</b>
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(156.782.124)	(145.153.082)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2017</b>	<b>-</b>	<b>11.629.042</b>

Sumber: Neraca Saiba 2017

Aset Tak Berwujud  
Rp93.032.354,00

#### C.3.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) untuk periode per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 memiliki nilai yang sama yaitu sebesar Rp93.032.354,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada BPS Kabupaten Lingga berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 23  
Rincian Aset Tak Berwujud  
Per 31 Desember 2017 Dan 31 Desember 2016

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016</b>	<b>93.032.354</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>93.032.354</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	(93.032.354)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2017</b>	<b>-</b>

Sumber: Neraca Percobaan Basis Akrual Saiba 2017

Aset Lain-Lain  
Rp63.749.770,00.

### C.3.2 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain untuk periode per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 memiliki nilai yang sama yaitu Rp63.749.770,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas BPS Kabupaten Lingga. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 24  
Aset Lain-Lain  
Per 31 Desember 2017 Dan 31 Desember 2016

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016</b>	<b>63.749.770</b>
Mutasi tambah:	-
-reklafikasi dari aset tetap	-
<b>Mutasi kurang:</b>	-
-penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
-penghapusan BMN	-
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>63.749.770</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	(63.749.770)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2017</b>	<b>-</b>

Sumber: Neraca BMN Tahun 2016

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan  
dan Amortisasi Aset  
Lainnya  
Rp(30.519.386,00)

### C.3.3. Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya untuk periode per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar minus Rp156.782.124,00 dan minus Rp145.153.082,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 25  
Rincian Akumulasi Penyusutan Dan Amortisasi Aset Lainnya  
Per 31 Desember 2017

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
(1)	(1)	(3)	(4)
Aset Tak Berwujud	93.032.354	93.032.354	0
<b>Jumlah</b>	<b>93.032.354</b>	<b>93.032.354</b>	<b>0</b>
Aset Lain-lain	63.749.770	63.749.770	0
<b>Jumlah</b>	<b>156.782.124</b>	<b>156.782.124</b>	<b>0</b>

Sumber: Neraca Percobaan Basis Akrua SAIBA 2017

Kewajiban Jangka  
Pendek  
Rp56.566.525,00

### C.4 Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek untuk periode per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 tersaji sebesar Rp56.566.525,00 dan Rp70.496.216,00.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak  
Ketiga  
Rp56.566.525,00

#### C.4.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga untuk periode per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp56.566.525,00 dan Rp70.496.216,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya

dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

*Ekuitas*

*Rp2.833.526.940,00*

### **C.5 Ekuitas**

Ekuitas untuk periode per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.833.526.940,00 dan Rp2.319.850.096,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan PNB*

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Rp1.014.760,00*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.014.760,00 dan Rp811.808,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 26

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

URAIAN	31 Des 2017	31 Des 2016	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,014,760	811,808	25.00
Jumlah	1,014,760	811,808	25.00

Pada Tahun Anggaran 2017, BPS Kabupaten Lingga memperoleh PNB lainnnya sebesar Rp1.014.760,00 yang terdiri dari :

1. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp1.014.760,00 yang berasal dari sewa rumah dinas.

*Beban Pegawai*

*sebesar*

*Rp1.570.637.235,00*

### D.2 Beban

#### D.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.570.637.235,00 dan Rp1.748.709.143,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan

atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 27

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2017	31 Des 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	629,901,600	743,784,820	(15.31)
Beban Pembulatan Gaji PNS	8,173	12,526	(34.75)
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	40,970,030	43,618,510	(6.07)
Beban Tunjangan Anak PNS	7,203,422	6,655,240	8.24
Beban Tunjangan Struktural PNS	33,120,000	32,580,000	1.66
Beban Tunjangan Fungsional PNS	22,560,000	13,920,000	62.07
Beban Tunjangan PPh PNS	4,164,873	5,545,900	(24.90)
Beban Tunjangan Beras PNS	29,402,520	33,023,520	(10.96)
Beban Uang Makan PNS	75,703,000	99,883,200	(24.21)
Beban Tunjangan Umum PNS	16,835,000	23,480,000	(28.30)
Beban Uang Lembur	41,488,000	-	-
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	669,280,617	746,205,427	(10.31)
<b>Jumlah</b>	<b>1,570,637,235</b>	<b>1,748,709,143</b>	<b>(10.18)</b>

*Beban Persediaan  
sebesar  
Rp52.858.215,00*

#### **D.2.2 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp52.858.215,00 dan Rp141.185.323,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 28

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2017	31 Des 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	52,858,215	141,447,362	(62.63)
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>52,858,215</b>	<b>141,447,362</b>	<b>(62.63)</b>

### D.2.3 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan  
Jasa sebesar Rp  
622,079,425,00*

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp622.079.425,00 dan Rp690.596.763,00.

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 29

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2017	31 Des 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	121.813.200	114.447.362	6,44
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	8.670.200	4.570.000	
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	388.970	292.700	32,89
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	92.880.000	48.102.000	93,09
Beban Barang Operasional Lainnya	1.300.000	0	0,00
Beban Bahan	101.409.275	49.809.000	103,60
Beban Honor Output Kegiatan	245.207.980	437.824.700	-43,99
Beban Barang Non Operasional Lainnya	24.105.000	2.475.000	873,94
Beban Langganan Listrik	21.075.000	15.042.000	40,11
Beban Langganan Air	2.029.800	244.400	730,52
Beban Sewa	0	6.250.000	-100,00
Beban Jasa Profesi	3.200.000	0	0,00
Beban Jasa Lainnya	0	11.539.601	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>622.079.425</b>	<b>690.596.763</b>	<b>-9,92</b>

*Beban  
Pemeliharaan  
sebesar  
Rp75.955.273,00*

#### D.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp144.526.873,00 dan Rp68.754.900,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 30

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2017	31 Des 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	48,633,273	5,100,000	0.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	95,893,600	63,654,900	50.65
Jumlah	144,526,873	68,754,900	110.21

*Beban Perjalanan  
Dinas sebesar  
Rp298.070.200,00*

#### D.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp298.070.200,00 dan Rp486.138.000,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 31

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2017	31 Des 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	57,473,700	38,659,000	48.67
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	151,897,500	166,029,000	-8.51
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	88,699,000	281,450,000	(68.48)
<b>Jumlah</b>	<b>298,070,200</b>	<b>486,138,000</b>	<b>(38.69)</b>

*Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar*

*Rp180.416.854,00*

#### D.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp180.416.854,00 dan Rp227.803.135,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Tabel 32

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2017	31 Des 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	132,765,212	163,060,769	(18.58)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	36,022,600	40,869,276	(11.86)
Beban Penyusutan Jaringan	-	615,000	(100.00)
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>168,787,812</b>	<b>204,545,045</b>	<b>(17.48)</b>
Beban Amortisasi <i>Software</i>	11,629,042	23,258,090	(50.00)
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>11,629,042</b>	<b>23,258,090</b>	<b>(50.00)</b>
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>180,416,854</b>	<b>227,803,135</b>	<b>(20.80)</b>

Surplus dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Rp71.469.988,00

### D.3 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Jumlah surplus dari kegiatan non operasional Tahun Anggaran 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp71.469.988,00 dan Rp2.158.950,00. Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 33  
Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

URAIAN	31 Des 2017	31 Des 2016	NAIK (TURUN) %
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	71,483,013	2,205,600	3140.98
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	13,025	46,650	-72.08
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	71,469,988	2,158,950	3210.40

Pos Luar Biasa  
Rp0,00

### D.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Jumlah pos luar biasa per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal*  
*Rp2.319.850.096,0*  
*0*

### E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.319.850.096,00 dan Rp2.039.072.405,00

*Defisit LO*  
*Rp2.796.104.054,0*  
*0*

### E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2.796.104.054,00 dan 3.360.216.506,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Selisih Revaluasi*  
*Aset Tetap*  
*Rp663.277.879,00*

### E.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp663.277.879,00. penilaian kembali aset berupa tanah kantor dan rumah dinas beserta bangunan kantor bangunan rumah dinas dan pagar kantor oleh kpknl batam

*Koreksi Nilai Aset*  
*Tetap Non*  
*Revaluasi sebesar*  
*Rp12.513.728,00*

### E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp12.513.728,00 dan minus Rp49.677.317,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Koreksi Lain-lain*  
*sebesar Rp0,00*

### E.5 Koreksi Lain Lain

Koreksi Lain Lain per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan minus Rp1.133.330,00. Koreksi ini

merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar Entitas

Rp2.633.989.291,00

### E.6 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.633.989.291,00 dan Rp3.691.804.844,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 34

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per 31 Desember Tahun 2017

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(71,912,473)
Ditagihkan ke Entitas Lain	2,696,620,424
Transfer Masuk	9,281,340
Transfer Keluar	0
<b>Jumlah</b>	<b>2,633,989,291</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

#### Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2017, DDEL sebesar (Rp71.912.473,00) sedangkan DKEL sebesar Rp2.696.620.424,00.

#### Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp9.281.340,00, Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 yang merupakan transfer Persediaan dan Peralatan dan Mesin ke BPS Kabupaten Lingga.

*Ekuitas Akhir  
sebesar*

*Rp2.297.258.418  
.00*

#### **E.7 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.833.526.940,00 dan Rp2.319.850.096,00

## **F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**

### **F.1 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL**

Daftar informasi pendapatan dan belanja akrual disajikan sebagaimana dalam lampiran.

### **F.2 REKENING PEMERINTAH**

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional BPS Kabupaten Lingga adalah

- Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tanjungpinang dengan nomor rekening 017401000495303 atas nama Bendahara Pengeluaran BPG 009 BPS Kab. Lingga.

### **F.3 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

**F.3.1** Laporan Keuangan Tahunan 2017 Badan Pusat Statistik Kabupaten Lingga disusun berdasarkan dari laporan SAIBA yang sudah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN Tanjungpinang sesuai Berita Acara Rekonsiliasi No: BAR-176055/WPB.31/KP.009/2017 Tanggal 15 Januari 2018.

#### **F.3.2 REVISI DIPA**

DIPA Badan Pusat Statistik Kabupaten Lingga Nomor: SP-DIPA 054.01.32.667201/2017 dengan nilai pagu awal Rp3.324.045.000,00. Pada Tahun Anggaran 2017 telah dilakukan Revisi DIPA sebanyak tiga kali, yang mengakibatkan perubahan nilai pagu, dengan rincian sebagai berikut :

##### **1. Revisi DIPA Pertama**

Revisi DIPA Pertama Tanggal 05 April 2017, merubah nilai pagu menjadi Rp3.292.735.000,00, karena dilakukan revisi antar Satuan Kerja (satker) oleh BPS Provinsi Kepulauan Riau.

2. Revisi DIPA Kedua

Revisi DIPA Kedua pada tanggal 12 Juni 2017, merubah nilai pagu menjadi Rp3.333.187.000,00, karena dilakukan revisi antar Satuan Kerja (satker) oleh BPS Provinsi Kepulauan Riau.

3. Revisi DIPA Ketiga

Revisi DIPA Ketiga pada tanggal 16 Agustus 2017, merubah nilai pagu menjadi Rp3.298.160.000,00, karena dilakukan revisi antar Satuan Kerja (satker) oleh BPS Provinsi Kepulauan Riau.

**F.3.3 Jurnal Penyesuaian Pada Laporan SAIBA**

Jurnal Penyesuaian pada Laporan SAIBA Badan Pusat Statistik Kabupaten Lingga yang dilakukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	No. Dokumen	Tgl. Dok	Keterangan	Debet	Kredit	Rupiah
1	201701667201001	30-01-17	Jurnal Balik atas Tunjangan Kinerja	512411	212111	(59.297.616)
2	201701667201002	30-01-17	Tagihan Rekening Berlangganan PDAM	522113	212112	(28.600)
3	201701667201003	30-01-17	Uang Makan PNS Bulan Desember 2016	511129	212111	(11.170.000)
4	201701667201004	29-12-17	Tunjangan Kinerja Bulan Desember	512411	212111	50.501.325
5	201701667201005	29-12-17	Uang Makan Pegawai Bulan Desember	511129	212111	6.035.000
6	201701667201006	29-12-17	Tagihan Rekening Air Desember 2017	521113	212112	30.200
<b>Jumlah Total</b>						(13.929.691)

Daik Lingga, 25 Januari 2018

Kepala BPS Kabupaten Lingga



**EKO APRIANTO**

**NIP. 19790414 200012 1 003**



# BPS KABUPATEN LINGGA

## Lampiran Pendukung Laporan Keuangan Satker TAHUN ANGGARAN 2017



Jl. Istana Kota Baru (Kompleks Perkantoran Pemda), Kelurahan Daik,  
Kecamatan Lingga – Provinsi Kepulauan Riau

Homepage: <http://linggakab.bps.go.id>, E-mail: [2104@bps.go.id](mailto:2104@bps.go.id)

**Lampiran A1**

**Badan Pusat Statistik Kabupaten Lingga  
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi,  
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap  
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017**

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		s.d Periode Ini	Periode Ini	Periode Ini	
<b>A</b>	<b>Tanah</b>						
1	Tanah	-	1.315.950.000	-	-	-	1.315.950.000
	<b>Jumlah</b>		<b>1.315.950.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.315.950.000</b>
<b>B</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>						
1	Alat Bantu	6	23.000.000	20.642.855	428.570	21.071.425	1.928.575
2	Alat Angkutan Kendaraan Bermotor	15	337.041.647	305.635.289	11.497.380	317.132.669	19.908.978
3	Alat Bengkel Tak Bermesin	1	1.590.600	477.180	318.120	795.300	795.300
4	Alat Ukur	1	2.376.000	2.376.000	-	2.376.000	-
5	Alat Pengolahan	2	3.819.992	3.819.992	-	3.819.992	-
6	Alat Kantor	28	122.288.557	76.271.757	14.850.300	91.122.057	31.166.500
7	Alat Rumah Tangga	78	169.949.376	114.752.077	23.196.299	137.948.376	32.001.000
8	Alat Studio	10	22.651.380	7.499.410	4.530.280	12.029.690	10.621.690
9	Komputer Unit	23	306.605.318	224.720.663	34.762.363	259.483.026	47.122.292
10	Peralatan Komputer	23	229.366.089	125.016.340	43.181.900	168.198.240	61.167.849
	<b>Jumlah</b>		<b>1.218.388.959</b>	<b>881.211.563</b>	<b>132.765.212</b>	<b>1.013.976.775</b>	<b>204.412.184</b>
<b>C</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	797.153.000	160.142.591	25.417.106	9.721.378	787.431.622
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	145.481.000	36.321.000	4.153.317	1.731.917	143.749.083
3	Tugu Dan Batas	50	347.312.000	34.762.650	6.452.177	4.134.667	343.177.333
	<b>Jumlah</b>		<b>1.289.946.000</b>	<b>231.226.241</b>	<b>36.022.600</b>	<b>15.587.962</b>	<b>1.274.358.038</b>
<b>D</b>	<b>Aset Tetap Yang Tidak Digunakan</b>						
1	Alat Angkutan Kendaraan Bermotor	15	1.340.000	1.340.000	-	1.340.000	-
2	Alat Kantor	28	29.234.386	29.234.386	-	29.234.386	-
3	Komputer Unit	23	14.300.000	14.300.000	-	14.300.000	-
4	Peralatan Komputer	23	18.875.384	18.875.384	-	18.875.384	-
	<b>Jumlah</b>		<b>63.749.770</b>	<b>63.749.770</b>	<b>-</b>	<b>63.749.770</b>	<b>-</b>
	<b>Total</b>		<b>2.665.117.083</b>	<b>1.257.590.886</b>	<b>180.416.854</b>	<b>1.186.346.861</b>	<b>1.478.770.222</b>